

BAB I PENDAHULUAN

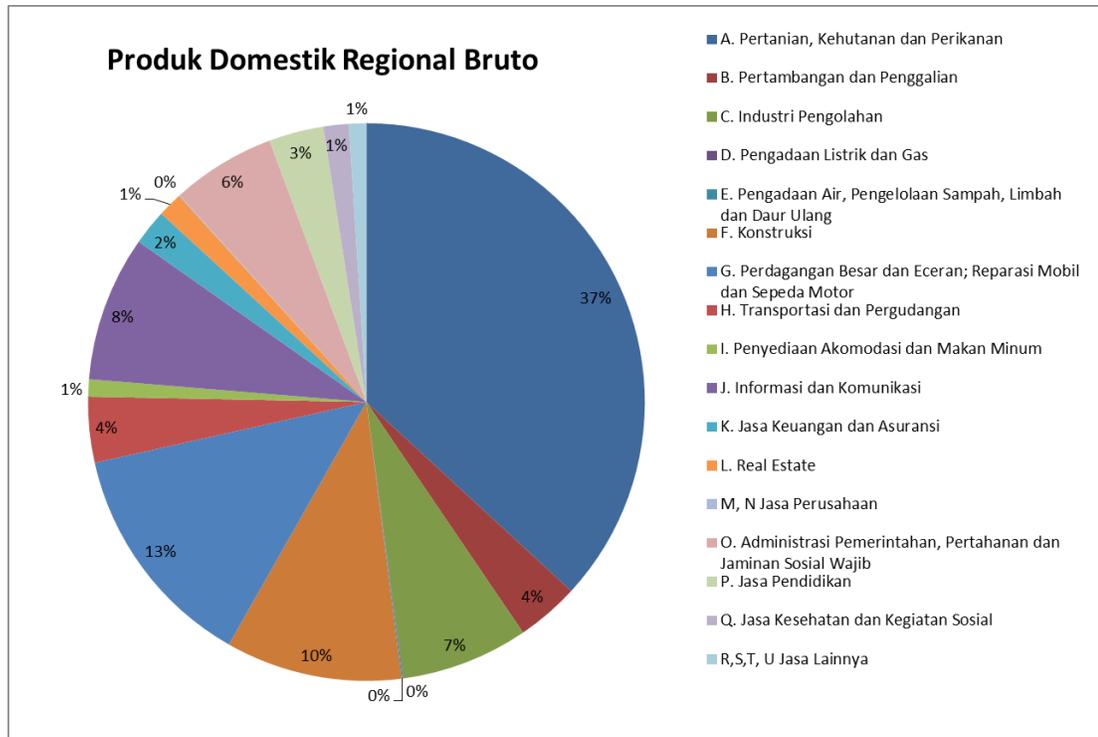
1.1 Latar Belakang

Pengembangan bidang pertanian merupakan kebijakan yang vital dan penting dalam penyusunan perekonomian daerah di Indonesia, karena sektor pertanian masih mendominasi perekonomian daerah-daerah di Indonesia (Aulia, 2017). Pembangunan pertanian saat ini ditujukan untuk peningkatan hasil output pertanian demi terpenuhinya keperluan pangan masyarakat dan bahan baku manufaktur dalam negeri, menaikkan angka ekspor dan penghasilan petani, menciptakan lebih banyak lapangan usaha bagi masyarakat, dan memacu terjadinya pemerataan. Pembangunan pertanian harus dikonsentrasikan pada komoditi unggulan dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan produksi dan produktivitas, serta meningkatkan pendapatan petani. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual perlu dikembangkan komoditi-komoditi unggulan dengan tetap memperhatikan kesesuaian agroekosistem (Hayati *et al*, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan dari aktifitas ekonomi publik yang menghasilkan peningkatan output berupa barang dan jasa serta kenaikan kekayaan masyarakat. Beberapa indikator seperti pendapatan nasional (produk nasional bruto dan produk domestik bruto), tenaga kerja dan pengangguran, tingkat inflasi, dan neraca pembayaran dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dijadikan sebagai alat pengukuran yang ditujukan untuk melihat kondisi perkembangan ekonomi suatu daerah/kawasan dari waktu ke waktu (Sukirno, 2012).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari nilai persentase perkembangan perekonomian yang didapatkan dari PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam periode 2016-2020 mengalami penurunan, bahkan menjadi negatif pada tahun 2020 sesuai dengan tabel pada lampiran 1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan didukung

oleh 17 sektor lapangan usaha. Sumbangan dari setiap sektor lapangan usaha terhadap PDRB diperlihatkan oleh gambar 1 :



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2020)

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwasanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 37 persen dari total PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbanyak yang menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di daerah pedesaan terutama di subsektor tanaman perkebunan dan tanaman pangan (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021). Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian subsektor perkebunan terbesar di Sumatera Barat yaitu sebanyak 53.685 rumah tangga (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020) (lampiran 2).

Segala bentuk usaha yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun perusahaan perkebunan termasuk kepada subsektor perkebunan (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2018). Kopi adalah komoditi perkebunan yang saat ini menjadi

perhatian secara nasional. Indonesia menempati posisi keempat dalam menghasilkan kopi di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2020). Komoditi kopi, sawit, pohon coklat (kakao), teh, dan kelapa merupakan komoditi yang menjadi sasaran utama dalam meningkatkan produksi komoditi unggulan dan prospek ekspor serta mendorong pengembangan industri manufaktur di pedesaan sesuai dengan rencana strategis Ditjen Perkebunan 2015-2019. Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 472/Kpts/Rc.040//6/2018 dan menentukan 18 provinsi dengan 41 kabupaten sebagai prioritas mengembangkan komoditi kopi. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tiga lokasi prioritas pengembangan komoditi kopi di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki tiga daerah utama penghasil kopi yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pesisir Selatan (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020). Kopi yang dihasilkan di Kabupaten Pesisir Selatan menyumbang 13 persen dari total produksi kopi Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan salah satu wilayah untuk mengembangkan komoditi kopi, sesuai dengan yang tertera didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kopi juga termasuk salah satu komoditi unggulan yang perlu dikembangkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan (Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021). Kopi merupakan produk perkebunan yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara terutama daerah-daerah sentra produksi kopi. Komoditi kopi setidaknya memberikan enam kontribusi bagi perekonomian nasional dan daerah antara lain penghasil devisa, sebagai penghasilan petani, menumbuhkan lapangan usaha baru, pengembangan daerah, pengembangan agribisnis dan agroindustri, dan pelestarian lingkungan (Sudjarmoko, 2013).

Komoditi unggulan ialah komoditi yang selain memiliki keunggulan komparatif, juga memiliki tingkat efisiensi usaha yang tinggi dan dapat bersaing dengan barang sejenis di pasaran (Ely, 2014). Ciri khas dari komoditi unggulan adalah (1) secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan

masyarakat, (2) mampu bersaing dipasaran, (3) memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan (4) memanfaatkan sumberdaya lokal dan bersifat *sustainable*. Secara regulasi komoditi unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan, artinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (Ambardi dan Prihawantoro, 2002). Namun hal itu tidak sesuai harapan karena nilai ekonomi komoditi unggulan tersebut belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan (Distanhortbun) (2020), sebagai salah satu sentra penghasil kopi ternyata budidaya komoditi kopi yang banyak dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan masih berupa perkebunan rakyat, dengan rata-rata luas lahan yang digarap untuk usahatani kopi hanya sekitar 1,30 hektar per petani. Kondisi perkebunan rakyat ini identik dengan pengelolaan budidaya tanaman kopi yang masih bersifat sederhana serta kurang intensif, masih rendahnya penerapan teknologi, modal usaha untuk budidaya kopi kecil, kurang baiknya pemeliharaan tanaman terutama dalam pemilihan bibit tanaman, penggunaan pupuk dan jumlah tenaga kerja yang tidak optimal sehingga produksi tidak maksimal (Thamrin, 2014).

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi kopi adalah luas lahan, modal, tenaga kerja, umur tanaman dan pengalaman berusahatani. Menurut Putri *et al* (2018) dan Fanggidae *et al* (2018), faktor luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi kopi dan peningkatan luas lahan berpotensi untuk meningkatkan produksi. Namun menurut Isyariansyah *et al* (2018), luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi dan jika luas lahan yang diusahakan tetap maka jumlah pohon yang ditanam perlu disesuaikan agar produksi meningkat. Faktor modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi (Putri *et al*, 2018) dan menurut Gathura (2013), faktor finansial berpengaruh pada output kopi yang dihasilkan. Menurut Pangkur *et al* (2020), tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kopi, sedangkan menurut Putri *et al* (2018) jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah produksi kopi. Umur tanaman tidak berpengaruh terhadap produksi kopi (Putri *et al*, 2018), sedangkan menurut Fatma (2011) pohon kopi akan mengalami peningkatan produksi secara terus menerus hingga puncak produksi pada umur 9

tahun. Menurut Prasad *et al* (2019), pengalaman budidaya yang dimiliki petani mempunyai hubungan positif dengan jumlah produksi, sedangkan menurut Fatma (2011) dan Putri *et al* (2018) menyatakan bahwa pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap jumlah kopi yang dihasilkan. Wairegi *et al* (2018) juga menambahkan bahwa peningkatan partisipasi petani muda dalam optimalisasi produksi perlu dilakukan.

Sebagian besar petani kopi di Kabupaten Pesisir Selatan hanya menjual langsung biji kopinya tanpa diolah menjadi produk olahan yang bernilai tambah. Hal ini tentu saja menyebabkan pendapatan yang diterima petani kopi rendah. Petani yang menjual bahan mentah dalam bentuk biji kopi dihargai sebesar Rp. 20 ribu per Kg, sedangkan produk olahan berupa kopi bubuk dapat dijual dengan harga Rp. 65 ribu per Kg (Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan, 2020). Faktor yang menyebabkan petani tidak melakukan pengolahan pascapanen adalah kurangnya pengetahuan mengenai proses pascapanen, kurang memadainya sarana pengolahan pascapanen dan kurangnya modal untuk melakukan pengolahan pascapanen (Wulandari, 2011).

Ketidaksanggupan petani untuk membeli peralatan pengolahan pascapanen, ketidaktahuan petani, tidak adanya tempat untuk menyewa peralatan pengolahan pascapanen, kekurangan modal, petani belum memahami keuntungan, dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan penanganan pascapanen yang baik menjadi beberapa kendala petani untuk melakukan pengolahan pascapanen (Swastika, 2012). Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tidak adanya modal usaha, manajemen produksi dan standar mutu menjadi faktor yang menyebabkan petani tidak melakukan pengolahan pascapanen (Taib dan Roswita, 2018). Para petani kopi menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan pengolahan pascapanen, antara lain kurangnya fasilitas pengolahan pasca panen yang memadai, kekurangan alat dan mesin untuk proses produksi, kelompok tani yang kekurangan dana, dan permasalahan dalam pemasaran produk mereka secara langsung jika mereka menciptakan barang-barang olahan (Aziz *et al*, 2020).

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun selama periode tahun 2016-2020, tentu perlu dilakukan perbaikan untuk menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah perbaikan sektor pertanian sebagai sektor yang dominan dalam perekonomian. Fokus kepada komoditi unggulan seperti komoditi kopi dengan mengoptimalkan pemanfaatan faktor produksi sehingga dapat memaksimalkan produksi dan peningkatan nilai tambah (*value added*) melalui pengolahan menjadi produk yang bisa dikonsumsi langsung. Dalam usaha meningkatkan nilai ekonomi komoditi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dirumuskan kebijakan yang tepat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait. Beberapa hal diatas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengembangan komoditi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan serta menciptakan strategi/kebijakannya.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Sumatera Barat (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020). Kopi termasuk salah satu komoditi unggulan yang perlu dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). Sebagai komoditi unggulan seharusnya produksi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menunjang produksi kopi secara nasional karena permintaan terhadap kopi mengalami peningkatan setiap tahunnya (Lampiran 3). Namun, antara tahun 2015 sampai 2019, luas tanaman dan produksi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan (Lampiran 4). Jika petani bisa mengatur sumber daya atau faktor produksinya secara efektif, maka produksi dapat dioptimalkan (Fatma, 2011). Untuk dapat memaksimalkan produksi kopi, perlu dikaji faktor yang mendorong produksi kopi dan mengetahui seberapa besar faktor tersebut mempengaruhi jumlah output kopi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Di sisi pengolahan pascapanen, ternyata mayoritas petani kopi di Kabupaten Pesisir Selatan hanya menjual produknya berupa biji kopi yang belum diolah menjadi produk bernilai tambah. Menurut data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan (Diskoperindag) (2020), produk kopi olahan

di Kabupaten Pesisir Selatan hanya tersedia dalam bentuk kopi bubuk, dengan total produksi hanya 74,15 ton per tahun atau sekitar 3,25 persen dari total biji kopi yang dihasilkan petani di Kabupaten Pesisir Selatan (Lampiran 5). Untuk memajukan kesejahteraan petani khususnya petani kopi, petani harus mampu mengupayakan pengolahan pascapanen sehingga dapat menciptakan produk yang bernilai lebih tinggi dan berdaya saing. Dari permasalahan tersebut, sehingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan petani tidak melakukan proses pengolahan pascapanen kopi
3. Bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan untuk pengembangan kopi di Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak melakukan proses pengolahan pascapanen kopi
3. Merumuskan kebijakan pengembangan komoditi kopi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari sisi metodologi, penelitian menggunakan analisis kuantitatif yang didukung dengan wawancara kepada petani kopi dan *stakeholders* terkait sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran untuk perencanaan pembangunan pertanian khususnya pengembangan komoditi kopi.

3. Dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi *stakeholders* terkait dalam mengembangkan komoditi kopi, serta bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan kepada faktor produksi dan pengolahan pascapanen yang mempengaruhi pengembangan kopi di Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel penelitian ini adalah petani yang melakukan budidaya kopi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dari tesis ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai tinjauan studi yang mendukung penelitian berupa teori, konsep, hasil riset terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan, variabel-variabel yang digunakan dan metode analisis data penelitian

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa hasil faktual temuan di lapangan dan membahas data-data hasil analisis serta implikasi kebijakan dalam pengembangan komoditi kopi di Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa kesimpulan dari temuan penelitian secara singkat dan saran yang bisa diberikan serta kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian

